PERBEDAAN KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM DENGAN ILMU SOSIAL LAINNYA

Andre Rizki Dwi Putra
Email: andrerizkidp@gmail.com
No BP: 1710003600382
Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Antropologi berasal dari kata Yunani (anthropos) yang berarti "manusia" atau "orang", dan logos yang berarti "wacana" (dalam pengertian "bernalar", "berakal") atau secara etimologis antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia.

Antropologi Hukum adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kebudayaan atau kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum, antropologi hukum ialah cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dengan dan penyelesaian pada masyarakat sehingga kalau terjadi pelanggaran atau tindakan yang menyimpang dari norma sosial maka yang melanggar akan diberikan sanksi, baik dalam bentuk tindakan fisik, sanksi sosial maupun ataupun sanksi lainnya yang mempunyai wewenang bertindak.

Antropologi lahir atau berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa pada ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya etnis-etnis lain yang berbeda dari masyarakat yang dikenal di Eropa. Pada saat itu kajian antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di suatu kawasan geografis yang sama, memiliki ciri fisik dan bahasa yang digunakan serupa, serta cara hidup yang sama. Namun demikian dalam perkembangannya, ilmu antropologi kemudian tidak lagi hanya mempelajari kelompok manusia tunggal yang mendiami suatu wilayah geografis yang sama. Kajian-kajian antropologi mengenai isu-isu migrasi misalnya kemudian melahirkan penelitian-penelitian etnografis multi-situs. Hal ini terjadi karena dalam perkembangannya, pergerakan manusia baik

dalam satu kawasan regional tertentu hingga dalam cakupan global adalah fenomena yang semakin umum terjadi. Ilmu antropologi serta sub-sub ilmunya juga mempunyai hubungan yang sangat banyak dengan ilmu-ilmu lain. Hubungan itu biasanya bersifat timbal-balik. Antropologi memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain itu, dan sebaliknya ilmu-ilmu lain itu masing-masing juga memerlukan bantuan antropologi.

Secara garis besar mempelajari antropologi bertujuan untuk memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis homo sapiens serta makhluk sosial dalam kerangka kerja yang komprehensif dan interdisipliner.

B. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Antropologi Hukum dengan Hukum Adat

Hukum Adat merupakan hukum peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.

- **Antropologi Hukum dengan Hukum Adat**
 - Menurut Bapak Antropologi Indonesia, yakni Koentjaraningrat mengatakan hukum adat memerlukan ilmu antropologi hukum, terutama mengenai metode-metode penelitiannya agar dapat mengkaji dan meneliti tentang latar belakang ilmu adat yang berlaku di suatu daerah.
 - Seorang ahli antropologi harus mengetahui hukum adat yang berlaku di suatu daerah, hal ini dikarenakan hukum adat itu membuat peneliti antropologi dapat beradaptasi dan mengikuti aturan-aturan adat yang ada dalam suatu daerah.
 - Hukum adat lahir dari kaidah-kaidah dan harus ditaati oleh masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adat lahir dari kebudayaan.

Pada kehidupan hukum, antropologi memberikan suatu alternatif hukum adat, yang disandarkan pada kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Pada bidang hukum, antropologi banyak memberikan catatan-catatan penting tentang bagaimana hukum adat yang selama ini menjadi faktor tak tertulis yang justru pada daerah tertentu menjadi hukum yang masih lebih dominan dipakai daripada hukum konvensional. Kehidupan sosial sendiri tak luput dari sasaran guncangan stabilitas pertahanan nasional. Isu SARA adalah isu yang paling mudah mengganggu stabilitas keamanan nasional oleh karena rawan konflik. Antropologi sendiri memfasilitasi dialog-dialog multikultural yang mendorong terciptanya pluralitas dimasyarakat bertujuan untuk tetap menjaga stabilitas keamanan didalam masyarakat (integrasi sosial yang berujung pada integrasi nasional). Bidang pertahanan dan keamanan sosial sebenarnya membutuhkan antropologi sebagai sumber informasi yang terkait dengan pengenalan karakter masyarakat dan kebudayaannya dalam rangka menjaga keutuhan NKRI yang terus diusahakan oleh seluruh masyarakat.

Sehingga dalam kajian antropologi hukum terdapat relevansi antara hukum dan perkembangan masyarakat dan lingkungan sosial sekitarnya, yang demikian pesat dimana hukum tumbuh dan berkembang sendiri didalamnya.

2. Perbedaan Antropologi Hukum dengan Etnologi

- Etnologi adalah ilmu tentang bangsa-bangsa, mempelajari unsur-unsur kebudayaan atau masalah kebudayaan suku bangsa dan masyarakat penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara komparatif, tujuannya menemukan proses evolusi dan persebaran kebudayaan umat manusia. Bahasa utamanya mengenai asas kemanusiaan dalam

kebudayaan berbagai suku bangsa.informasi di peroleh melalui pencatatan secara inci terhadap suatu kebudyaaan di masa lalu dan masa kini.

- Etnologi telah digunakan dalam pengembangan teori-teori komunikasi,selain itu Etnologi juga digunakan dalam ilmu antropologi sosial budaya,pada dasarnya Antropologi hukum merupakan turunan dari Etnologi hukum yang perkembangannya di sebut antropologi hukum,jadi dari sejarahnya Antrolpologi hukum memiliki satu induk keilmuan dengan etnologi terutama etnologi hukum.

Sehingga dalam kajian antropologi hukum terdapat perbedaan yaitu dalam Antropologi, fokusnya adalah pada unsur alam dan sosial budaya yang menyangkut manusia dan Etnologi adalah subbidang Antropologi Budaya.

3. Perbedaan Antropologi Hukum dengan sosiologi Hukum.

- Sosiologi Hukum dan Antropologi hukum memiliki objek yang jelas yaitu manusia.Antropologi Hukum mengkaji suatu budaya yang terjadi pada kelompok masyarakat dan sosiologi hukum lebih menitik beratkan pada mausia dan berbagai proses hubungan sosialnya.adanya antropologi hukum dan sosiologi hukum membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur.berbagai bentuk penyimpangan sosial memang kali terjadi di lingkungan masyarakat,namun ada banyak langkah pencegahan yang bisa dilakukan dan salah satunya dengan mempersembahkan sosiologi hukum serta ilmu antropologi hukm.

4. Perbedaan Antropolgi Hukum dengan Psikologi Sosial

- Psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempunyai hubungan antara manusia dengan kelompoknya.hal ini dipengaruhi oleh manusia itu sendiri

sehingga dalam suatu lingkungan akan yang terjadi pertengkaran, pertikaian hingga perselisihan.

- Antropologi Hukum dan psikologi Sosial adalah dua mata pelajaran dalam bidang ilmu sosial di mana sejumlah perbedaan dapat disorot. Antropologi bersifat holistik dan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia (tentu saja dalam lingkungan budaya) sedangkan, keilmuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan kelompok pada lingkungannya yang dipengaruhi dengan perilaku manusia.

4. Perbedaan Antropologi Hukum dengan Religi

- Antropologi Agama atau Antropologi Religi mempelajari mengenai bagaimana agama diyakini, dijalankan atau dipraktikkan di dalam masyarakat. Agama yang dipelajari oleh antropologi adalah agama sebagai fenomena budaya, tidak agama yang diajarkan oleh Tuhan.
- Antropologi agama menunjuk kepada suatu penghubung yang unik atas moralitas, hasrat, dan kekuatan dengan dikendalikan dan kemerdekaan, dengan duniawi dan asketisme, dengan idealis dan kekerasan, dengan imajinasi dan penjelmaan, dengan imanensi dan transendensi yang merupakan sisi dunia manusia yang berbeda dengan makhluk lain. Antropologi agama bersifat abstrak tetapi dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku individu termasuk hubungan antara individu dengan hal yang berkaitan dengan supranatural

C. PENUTUP

- Terkait dengan fungsi disiplin ilmu antropologi Hukum sendiri, menjadi hal unik untuk dikaji tentang sudut pandang antropologi Hukum yang membedakannya dengan antropologi hukum. Pada suatu perbandingan, jika antropologi hukum lebih menitikberatkan suatu budaya hukum yang berkaitan atau mempengaruhi masalah hukum (aspek yang melatar belakangi hukum dan penyelesaian hukum). Pada sudut pandang yang berbeda, antropologi memandang suatu fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat dengan mengaitkan pada nilai, norma, adat, tradisi, dan budaya yang berada dikehidupan masyarakat tersebut. Antropologi menempatkan fungsinya sebagai disiplin ilmu yang memakai perspektif budaya (mengedepankan nilai-nilai budaya) dalam penyelesaian masalah kehidupan sosial manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102>.
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.

- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, *Dialogica Jurnalica*, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, *UIR Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, *Doctrinal*, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, *Journal of Innovation, Creativity and Change* Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, *Jurnal Yuridis*, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review*, Volume 2, Nomor 3, 2020..